KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-70
	TANGGAL PEMBUATAN	**24 JUNI 2025**
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PEMBUKAAN REKENING GIRO SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 5 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga 9 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 10 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2 Memahami peraturan terkait penatausahaan rekening giro satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum 3 Mempunyai kemampuan penelaahan dan penyelesaian permasalahan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	1 Komputer/Printer/Scanner 2 Jaringan Internet 3 Alat Komunikasi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka proses pelaporan rekening pemerintah tidak tepat dan menghambat data laporan keuangan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBUKAAN REKENING GIRO SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		SATUAN KERJA	BIRO KEUANGAN	KPPN	BANK UMUM	KEMENTERIAN KEUANGAN (DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Satuan Kerja mengajukan permohonan persetujuan dan pembukaan rekening kepada KPPN setempat	MULAI					Surat Permohonan Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	5 Hari Kerja	Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	
2	KPPN menerbitkan Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening yang akan disampaikan kepada Satuan Kerja yang melakukan pengajuan						Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	5 Hari Kerja	Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	
3	Satuan Kerja melakukan pembukaan rekening Giro pada Bank Umum						Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	10 Hari Kerja	Dokumen dan Informasi mengenai Rekening Satker	
4	Satuan Kerja melakukan perekaman rekening pembukaan melalui aplikasi SPRINT						Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja	1 Hari Kerja	Approval Pembukaan Rekening pada aplikasi SPRINT	
5	Satuan Kerja melaporkan Pembukaan Rekening kepada Biro Keuangan dalam rangka penatausahaan rekening pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum						Surat Persetujuan dan Pembukaan Rekening Satuan Kerja dan Hasil Tangkapan Layar Approval Pembukaan Rekening pada Aplikasi SPRINT	1 Hari Kerja	Draft Laporan Rekonsiliasi Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum	
6	Biro Keuangan melakukan rekonsiliasi rekening pemerintah dengan Kementerian Keuangan guna memastikan kesesuaian data rekening dan melaporkan kepada Kementerian Keuangan					SELESAI	Laporan Rekonsiliasi Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum	1 Hari Kerja	Berita Acara Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup K/L	